



PROFIL PENGARUSTAMAAN GENDER

2025

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

**PROFIL
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SURABAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 03 Februari 2025

**Kepala Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PROFIL BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	xx
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	15
BAB IV.TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	xx
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	xx
BAB VI. PENUTUP	xx
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.
10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender,Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi

3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024

BAB II

PROFIL BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

2.1 Gambaran Umum

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya merupakan salah satu bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Surabaya dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan Sumber Daya Alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan Sumber Daya Alam;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan Sumber Daya Alam;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuankebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan Sumber Daya Alam;
- e. penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- f. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Visi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan implementasi dari Visi Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yakni "*“Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan.”*

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, perlu diwujudkan melalui Misi Kota Surabaya Nomor 4 yakni ***“Memantapkan Transformasi Birokrasi yang Bersih, Dinamis dan Tangkas berbasis Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.”***

2.3 Demografi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya merupakan salah satu bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Surabaya dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki tugas melaksanakan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan Sumber Daya Alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan sumber daya alam, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu dengan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator. Sehingga secara struktural, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki 2 Ketua Tim Kerja dan 1 Ketua Sub Bagian yakni Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas :

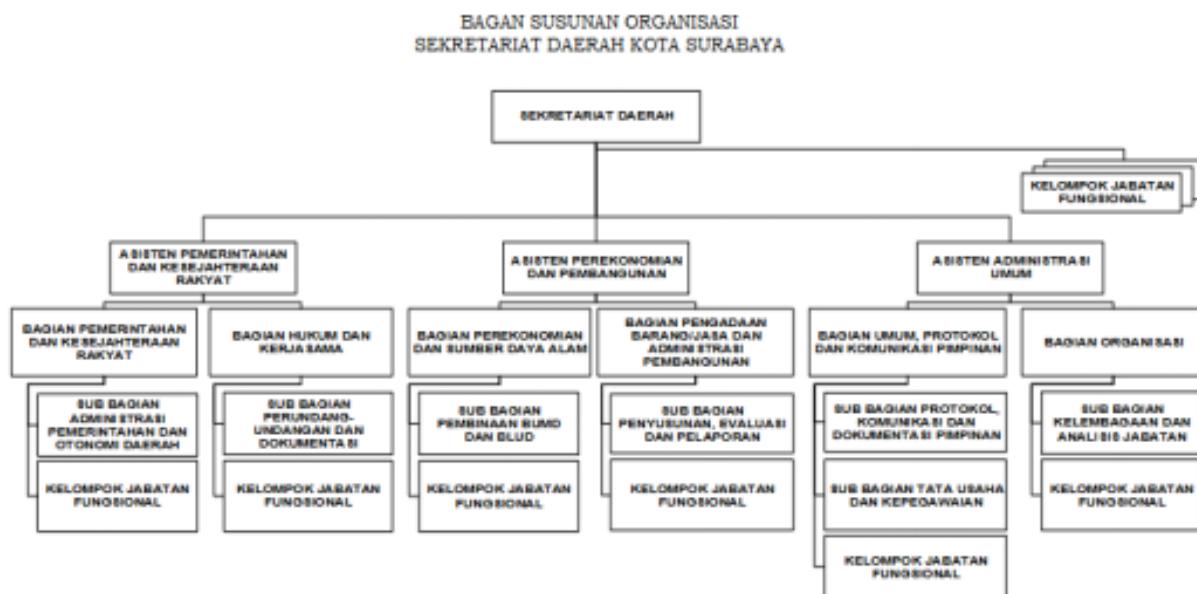
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. menyiapkan bahan pengordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- f. menyiapkan bahan analisis pengembangan dan potensi investasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah;
- g. menyiapkan bahan evaluasi kebijakan dan investasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan potensi investasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan

Badan Layanan Umum Daerah;

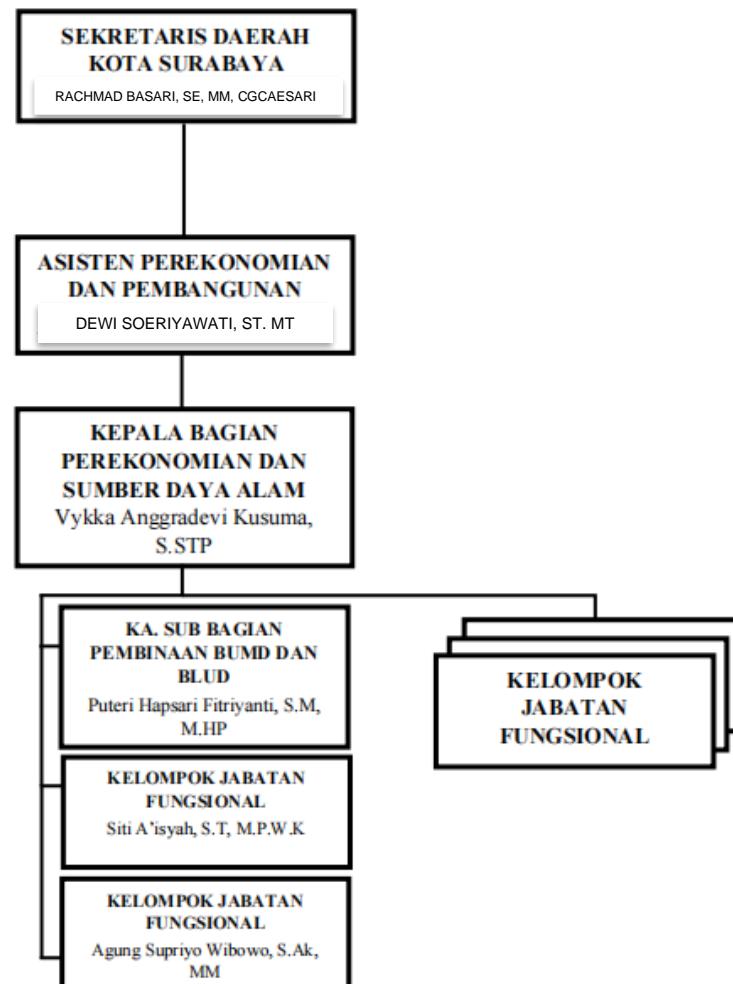
- j. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Milik Daerah;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan BadaGn Layanan Umum Daerah;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Gambar 2.1
SOTK Sekretariat Daerah Kota Surabaya



Gambar 2.2
SOTK Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam



Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai atau mendukung. Adapun untuk susunan jumlah pegawai atau Sumber Daya Manusia yang ada di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :

Tabel 2.1

Komposisi Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SMP	-
2.	SMA	2
3.	Diploma I - D - I	1
4.	Diploma III - D - III	2
5.	Diploma IV - D-IV	-
6.	Strata I - S-1	10
7.	Strata II - S2	5

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Dasar hukum atau kebijakan yang digunakan dalam Pengarustamaan Gender di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tertuang pada :

- a. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
- b. Surat Perintah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/397/436.2.1/2024

Dokumen pendukung dasar hukum atau kebijakan terdapat pada link berikut :
<https://drive.google.com/file/d/1otDv-W0z5o9x2NiWhgz2HTVQKQw9eUhj/view?usp=sharing>

2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka penguatan pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam maka dilakukan internalisasi berupa sosialisasi PUG terhadap seluruh pegawai yang ada di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta penguatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengarustamaan Gender yang diadakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Pada Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan tersebut yakni dilaksanakan pada :

- a. Internalisasi PUG dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025 terhadap seluruh pegawai Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Diklat Pengarustamaan Gender (PUG) yang diikuti oleh Anggota Focal Point Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada tanggal 16 – 20 Juni 2025.

Dokumen pendukung pelaksanaan Sosialisasi PUG terdapat pada link berikut :
<https://drive.google.com/file/d/1UbVdUk4jSLO0pDTRr1IQ9HUzZ0Cq1Zxs/view?usp=sharing>

2.4.3 SDM Terlatih PUG

1. SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tiara Melati, S.I.P.,M.KP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Telah memiliki Sertifikat Diklat PPRG
2.	Intan Aprilia Kartikasari, S.M	Penata Layanan Operasional	Telah mengikuti Bimtek Penyusunan Dokumen PPRG
3.	Ulumil Istifaiyah, S.M.	Penata layanan Operasional	Telah memiliki Sertifikat Diklat PPRG

Jumlah SDM Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah SDM Terlatih	%
20	2	10

Dokumen pendukung SDM yang terlatih PUG terdapat pada link berikut : <https://drive.google.com/drive/folders/12QMe5mO5x1UsjcLB9Kwbpuvvav7uaXHF?usp=sharing>

2. Focal Point PUG

Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/397/436.2.1/2024 yang menugaskan pegawai Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk menjadi Tim Focal Point Pengarustamaan Gender pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Tim Focal Point Bagian Perekonomian dan SDA	Keterangan
8	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian selaku Pembina b. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Sumber Daya Alam selaku Ketua c. Sekretaris d. Anggota

Adapun dokumen pendukung Focal Point PUG terdapat pada link berikut : <https://drive.google.com/file/d/1otDv-W0z5o9x2NiWhgz2HTVQKQw9eUhj/view?usp=sharing>

2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

Jumlah Sumber Daya Manusia sebagaimana yang dapat dilihat pada Data terpilah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 yakni sebagai berikut berikut :

Tabel 2.2
Data Terpilah Bagian Perekonomian dan SDA

No	Jabatan	ASN/Non ASN	Jumlah Jenis Kelamin		Jumlah Total
			L	P	
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	ASN	0	1	1
2.	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	ASN	1	0	1

3.	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil serta Sumber Daya Alam	ASN	0	1	1
4.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD	ASN	0	1	1
5.	Staff	ASN	3	5	8
6.	Staff	Non-ASN	4	4	8
Jumlah Total			8	12	20

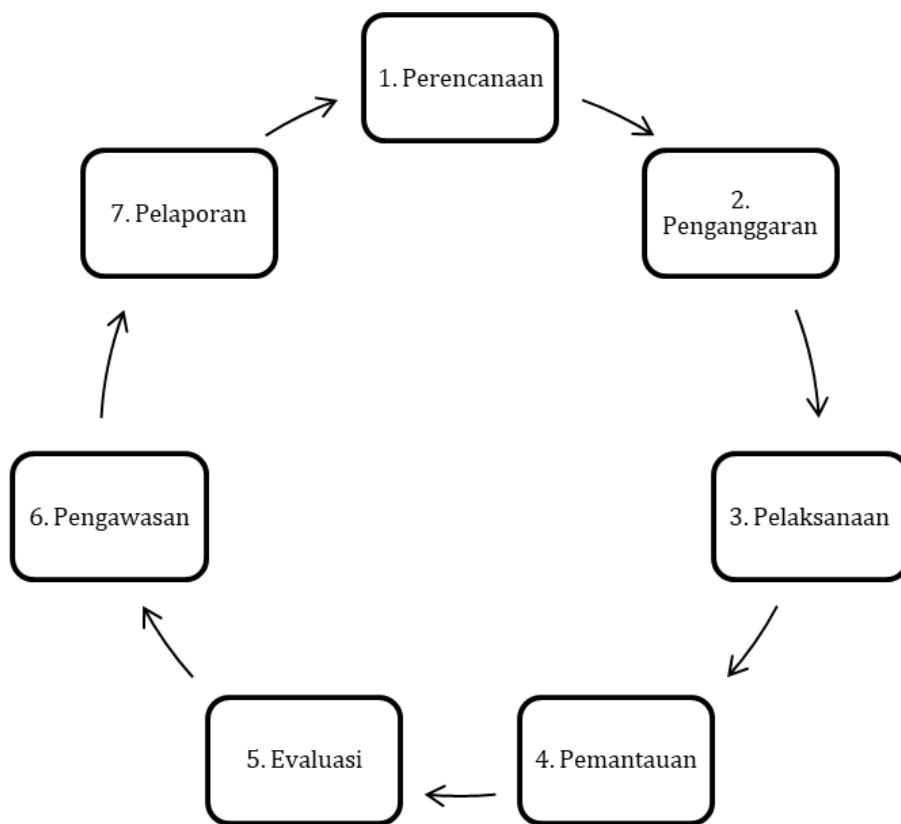
Adapun dokumen secara rinci Data Terpisah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat dilihat pada link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10iyZ_LeuwUCPUaGx6SJadaMu4OPSO6_PPUw0ZITAHTA/edit?usp=sharing

BAB III

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu ataupun permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/Kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

Dalam pelaksanaan Pengarustamaan Gender yang ada di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan adalah Surat Perintah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/397/436.2.1/2024.

Adapun link regulasi atau kebijakan yang mengatur PUG dapat dilihat pada link berikut:
<https://drive.google.com/file/d/1otDv-W0z5o9x2NiWhgz2HTVQKQw9eUhj/view?usp=sharing>

b. Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender

Secara keseluruhan, Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada masing-masing bagian menjadi satu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan berpedoman pada pelaksanaan Visi dan Misi Kota Surabaya secara keseluruhan. Adapun link Renstra dan Renja pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada link berikut :
<https://drive.google.com/drive/folders/1FDQ9PC-L-LkDSnFuzMoQdH98gkd0Rjdz?usp=sharing>

c. Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR)

Program/kegiatan maupun Sub Kegiatan yang memberi manfaat adil bagi laki-laki dan perempuan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari tiga sub kegiatan pada Tahun 2025 yang terdiri dari Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil serta Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebagaimana dapat dilihat pada dokumen GAP, GBS dan TOR Tahun 2025 pada link berikut :

<https://drive.google.com/file/d/1E9FMRgef-Md0Dhl7vQKF2SQVZRsDtLfi/view?usp=sharing>

d. Hasil Analisis Gender

Hasil Analisis Gender tertuang dalam bentuk dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) sebagaimana dapat dilihat pada dokumen GAP, GBS dan TOR Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2025 yang ada pada link berikut : <https://drive.google.com/file/d/1E9FMRgef-Md0Dhl7vQKF2SQVZRsDtLfi/view?usp=sharing>

e. Alat Analisis Gender

Alat dan Tehnik Analisis Gender yang digunakan adalah Model Gender Analysis Pathway (GAP).

Komponen Utama Analisis Gender Model Gender Analysis Pathway (GAP) menggunakan 9 langkah, yakni yang terdiri dari :

1. Langkah pertama: Memilih kebijakan/ program/ kegiatan
2. Langkah ke-2: Menyajikan data pembuka wawasan terpisah menurut jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif
3. Langkah ke-3: Mengenal Isu kesenjangan gender
4. Langkah ke-4: Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal)
5. Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal)
6. Langkah ke-6: Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan
7. Langkah ke-7: Menyusun rencana aksi
8. Langkah ke-8: Tetapkan baseline (data dasar)
9. Langkah ke-9: Indikator gender

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan tentang Penganggaran Pengarustamaan Gender yang didasarkan pada pencapaian Visi dan Misi Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang selaras dengan :

- RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
- Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026
- Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026
- Surat Perintah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/397/436.2.1/2024.

Dokumen penganggaran yang responsif gender sebagaimana dapat dilihat pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1FDQ9PC-L_kDSnFuzMoQdH98gkd0Rjdz?usp=drive_link

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Anggaran Responsif Gender Bagian Perekonomian dan SDA

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp 1.415.047.153,-
2	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp 629.809.550,-
3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp 1.945.599.986,-
TOTAL ANGGARAN		Rp 3.990.456.689,-

3.2 Pelaksanaan

a. Output yang mendukung Pemberdayaan Perempuan

Adapun output yang mendukung Pemberdayaan Perempuan diwujudkan dalam beberapa bidang urusan yakni yang terdiri dari Bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Hukum, dan Bidang Lainnya sebagaimana pada penjelasan berikut :

No	Bidang Urusan	Kegiatan
1.	Politik	Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan serta melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan berupa pengawasan kebijakan maupun program yang berkaitan dengan anggaran responsif gender.
2.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisa keterlibatan perempuan pada kegiatan Usaha Mikro Kecil serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan keterlibatan perempuan pada kegiatan Usaha Mikro Kecil. - Memberikan bantuan intervensi yang sama terhadap perempuan.
3.	Sosial	Melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun internalisasi untuk meningkatkan kesadaran perihal pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
4.	Hukum	Menegakkan dan menertibkan peraturan dan hukum yang berlaku apabila terjadi tindakan kekerasan perempuan/anak yang tidak sesuai dengan prinsip pengarustamaan gender.
5.	Bidang Lainnya	Mengikutsertakan perempuan dalam program-program lingkungan salah satunya adalah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

b. Ketersedian Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu lembaga yang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan dengan berbagai program dan layanan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, memberikan akses yang lebih luas kepada

perempuan untuk mendapat pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Salah satu bentuk Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah adanya Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkontribusi aktif untuk meningkatkan kapasitas perempuan melalui berbagai kegiatan diantaranya melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang hak-hak perempuan serta dukungan keikutsertaan perempuan dalam Usaha Mikro.

c. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring

Dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Internal Perangkat Daerah maka upaya yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah dengan membentuk Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang berperan penting untuk memberikan edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak perempuan, pelatihan keterampilan bagi perempuan dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi, serta gotong royong dan kolaborasi aktif untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.

d. Ketersediaan Layanan bagi Perempuan dan Anak di Internal PD dan Jejaring

Salah satu bentuk adanya layanan bagi perempuan dan anak yang ada di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah adanya fasilitas umum yang ramah perempuan dan anak yakni dalam bentuk adanya Ruang Laktasi yang memberikan kenyamanan bagi Ibu menyusui serta adanya pemisahan toilet laki-laki dan perempuan.

e. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dilakukan dalam berbagai kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan memberikan wawasan dan keterampilan yang tidak hanya berfungsi untuk personal, namun untuk peningkatan kualitas keluarga salah satunya yakni melalui Pelatihan *Make-up*, pelatihan *Parenting* dan berbagai kegiatan pelatihan lainnya.

f. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan bentuk adanya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga karena sebagai wadah aspirasi, kreativitas maupun kemandirian dari perempuan yang terus dilatih dan senantiasa dikembangkan untuk memberikan suatu hasil yang positif dalam masyarakat.

g. Program Pembagunan Berbasis Kewilayahannya yang Mengintegrasikan Perspektif

Gender

Bentuk program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan prespektif gender diantaranya yakni dengan mewujudkan sistem pelayanan prima yang ramah perempuan dan anak dengan berbasis digital.

h. Data Angka Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring

Berdasarkan data dan kondisi real yang ada saat ini, tidak ditemukan kasus kekerasan perempuan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Hal ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

i. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender memastikan semua pihak, tanpa memandang gender memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang aman dan nyaman. Salah satunya yakni adanya toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

j. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal dan Jejaring

Pembinaan Pengarustamaan Gender di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam diwujudkan dalam bentuk penyusunan Dokumen Pengarustamaan Gender yang terdiri dari Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk GAP, GBS, dan TOR.

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender telah diatur dalam Surat Perintah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/397/436.2.1/2024 yang menugaskan Focal Point Gender yang ada di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk memantau pelaksanaan kesetaraan Pengarustamaan Gender yang ada di Bagian Perekonomian dan SDA.

3.4 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tidak hanya melibatkan unsur internal Perangkat Daerah, namun juga melibatkan unsur eksternal dari Perangkat Daerah tetapi juga melibatkan unsur dari eksternal Perangkat Daerah. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

3.5 Pelaporan

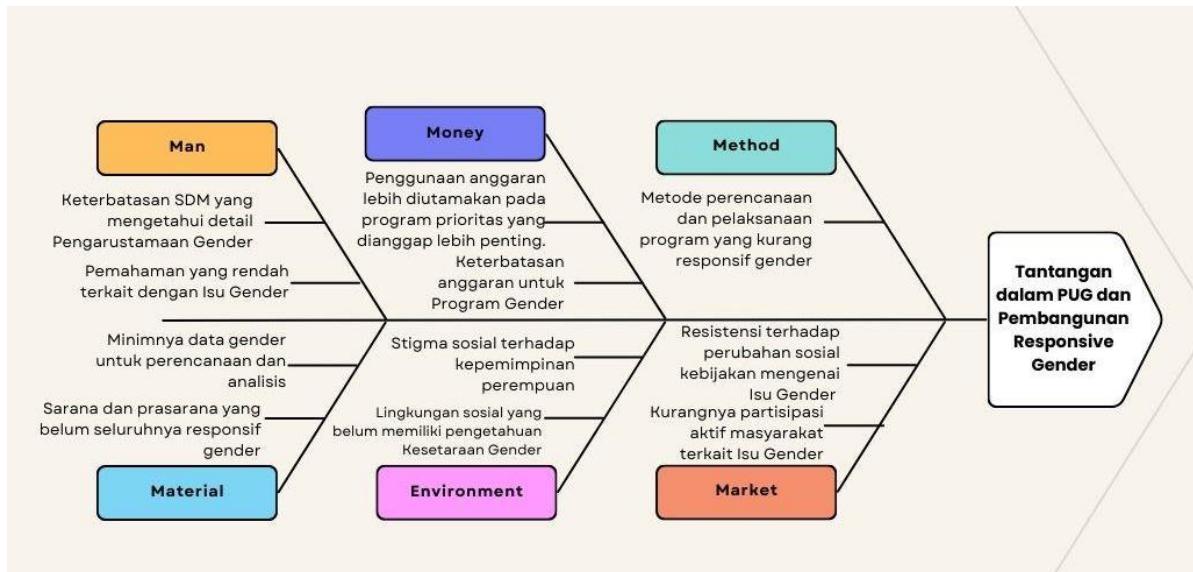
Pelaporan Pengarusutamaan Gender mengacu pada Surat Perintah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/397/436.2.1/2024 yang menugaskan pegawai untuk menjadi Tim Focal Point Pengarustamaan Gender di Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Pelaporan Pengarusutamaan Gender diimplementasikan dalam bentuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terdiri atas GAP, GBS, dan TOR beserta Profil Gender Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

BAB IV

TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



4.2 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis Fishbone tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

- Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Pengarustamaan Gender diantaranya adalah masih minimnya pemhaman terkait dengan Isu Responsif Gender;
- Perlu dilakukan upaya perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan Pengarustamaan Gender salah satunya yakni perlunya penguatan pemhamaman dan kebijakan yang berkaitan dengan Pengarustamaan Gender yang mencakup aspek-aspek penting terkait gender;
- Dalam rangka penguatan pemahaman dan kebijakan yang berkaitan dengan responsif gender maka perlu dilakukan latihan dan internalisasi pemahaman terkait dengan Isu Gender di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kemampuan dalam mengintegrasikan perspektif gender.

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

Yang sudah dilaksanakan :

- Mengikuti Bimbingan Teknis dan Diklat Pengarustamaan Gender;
- Mengalokasikan anggaran untuk program-program yang berorientasi pada Pengarustamaan Gender;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan alokasi dana yang berkaitan dengan Pengarustamaan Gender;
- Melakukan review dan perbaikan terhadap kebijakan agar lebih responsif gender.

Rekomendasi / Saran :

- a. Penyusunan kebijakan yang lebih detail dalam mengintegrasikan aspek responsif gender dalam pelaksanaan program maupun kegiatan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Penguatan pendidikan dan pelatihan ataupun Internalisasi Responsif Gender yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan rutin terkait dengan gender terhadap seluruh pegawai yang ada di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

a. SI-OM EKSIS

SI-OM EKSIS merupakan Inovasi berbasis web dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yakni berupa pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemantauan terhadap inflasi Kota Surabaya dari harga bahan pokok penting. Selain BUMD, pada aplikasi ini juga berisi data-data yang digunakan sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan penilaian kinerja BUMD, masa jabatan direksi dan komisaris, data internal BUMD seperti jumlah SDM, jumlah pedagang, jumlah spesies pada kebun binatang, serta data harga bahan pokok penting masih belum valid, masih belum terolah dan terintegrasi .

Lampiran

1. Surat Perintah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/397/436.2.1/2024
Dokumen pendukung SP Focal Point terdapat pada link berikut :
<https://drive.google.com/drive/folders/15-Y3Dv1ZCjs8I13H0GpAgy0K5ZwByyDS>
2. Foto/Dokumentasi Kegiatan Responsif Gender Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk masyarakat yang sudah dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir, dapat dilihat pada link berikut:<https://drive.google.com/drive/folders/1PVAaA5zAmXxWGCqK1SYpd-maErz7G5wW>

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan Profil PUG Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Responsif Gender Bersinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak Tahun 2025